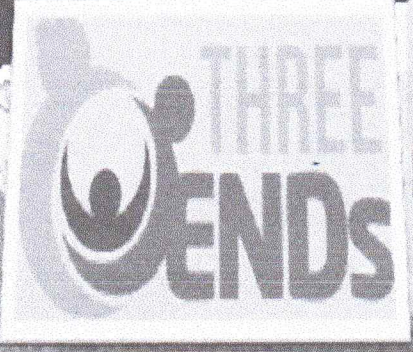
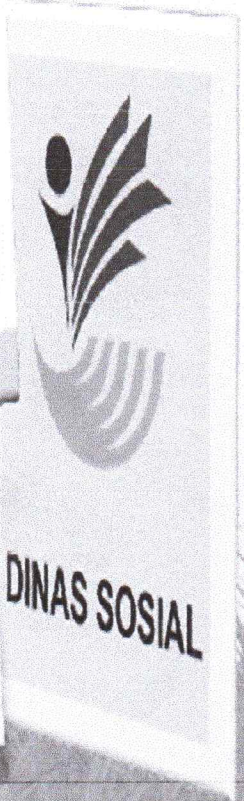
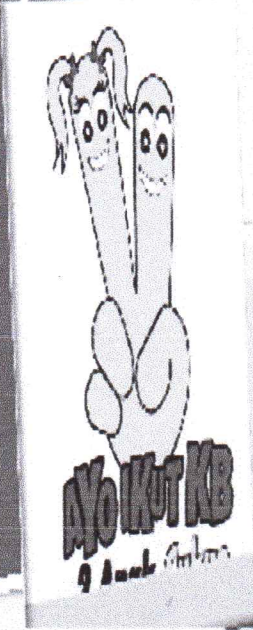




RENCANA STRATEGIS



**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
(DINSOSP3APPKB)**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) serta Rencana Kinerja Tahunan.

Renstra – OPD (Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah) ini disusun sebagai gambaran awal rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya dalam 5 (lima) tahun kedepan, dengan memberikan skala prioritas pada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas daerah dalam pembangunan, sehingga rencana strategis OPD ini, dapat selaras dengan program pemerintah pusat dan daerah, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di lapangan.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang wajib dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/non struktural/fungsional dilingkungan DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan/i. khususnya **Tim Penyusun** serta pihak-pihak terkait *stakeholders* yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat dialog maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media atas terwujudnya Renstra ini.

Selanjutnya sangat disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka **Renstra** ini juga **bersifat fleksibel**. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Semoga, apa yang menjadi Rencana Strategis DINSOSP3APPKB ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung,

2021

Kepala Dinas SOSP3APPKB,



BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820521 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINSOSP3APPKB	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	8
2.2 Pohon Kinerja 2021-2026	12
2.3 Sumber Daya OPD	13
2.4 Kinerja Pelayanan OPD	16
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	24
2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	26
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOSP3APPKB ...	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	43
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII. PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) adalah dokumen perencanaan DINSOSP3APPKB untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan terpilihnya Bapak Sutan Riska, SE sebagai Bupati Dharmasraya, dan Bapak Drs. Dasril Panin Dt. Labuan sebagai Wakil Bupati maka perlu adanya penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi kepala dan wakil kepala daerah terpilih dengan tugas pokok dan fungsi dari DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, maka DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya harus menyelaraskan Rancangan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

Berbagai masalah yang mendasar antara lain; relatif tingginya persentase dan besar jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat kecendrungan memburuknya distribusi pendapatan, masih rendahnya daya

beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, dan pengelolaan sumberdaya alam.

Berdasarkan pada realitas tersebut, tantangan yang menghadang dalam kurun waktu ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi perlu didukung dengan penanggulangan kemiskinan, yang diringi dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Usaha penanganannya akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan baik pendekatan sektoral maupun kewilayahannya serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Dharmasraya. Dalam kerangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Dharmasraya, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rancangan Renstra DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DINSOSP3APPKB tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;

14. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas SOSP3APPKB ini untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas SOSP3APPKB
2. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas SOSP3APPKB
3. Penyelarasan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2021-2026 serta tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan Latar Belakang Penyusunan Renstra Perubahan DinsosP3APPKB, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Perubahan DinsosP3APPKB, dan Sistematika Penulisan Renstra Perubahan DinsosP3APPKB.

2. BAB II Gambaran Pelayanan DINSOSP3APPKB

Dalam Bab ini Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DinsosP3APPKB, Sumber Daya DinsosP3APPKB, Kinerja Pelayanan DinsosP3APPKB dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinsosP3APPKB.

3. BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam Bab ini diuraikan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinsosP3APPKB, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Telaahan Isu-Isu Strategis Nasional dan Daerah.

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

Dalam Bab ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinsosP3APPKB.

5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam Bab ini diuraikan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan DinsosP3APPKB dalam lima tahun mendatang.

6. BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DinsosP3APPKB.

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DinsosP3APPKB Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

8. BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DinsosP3APPKB.

BAB II

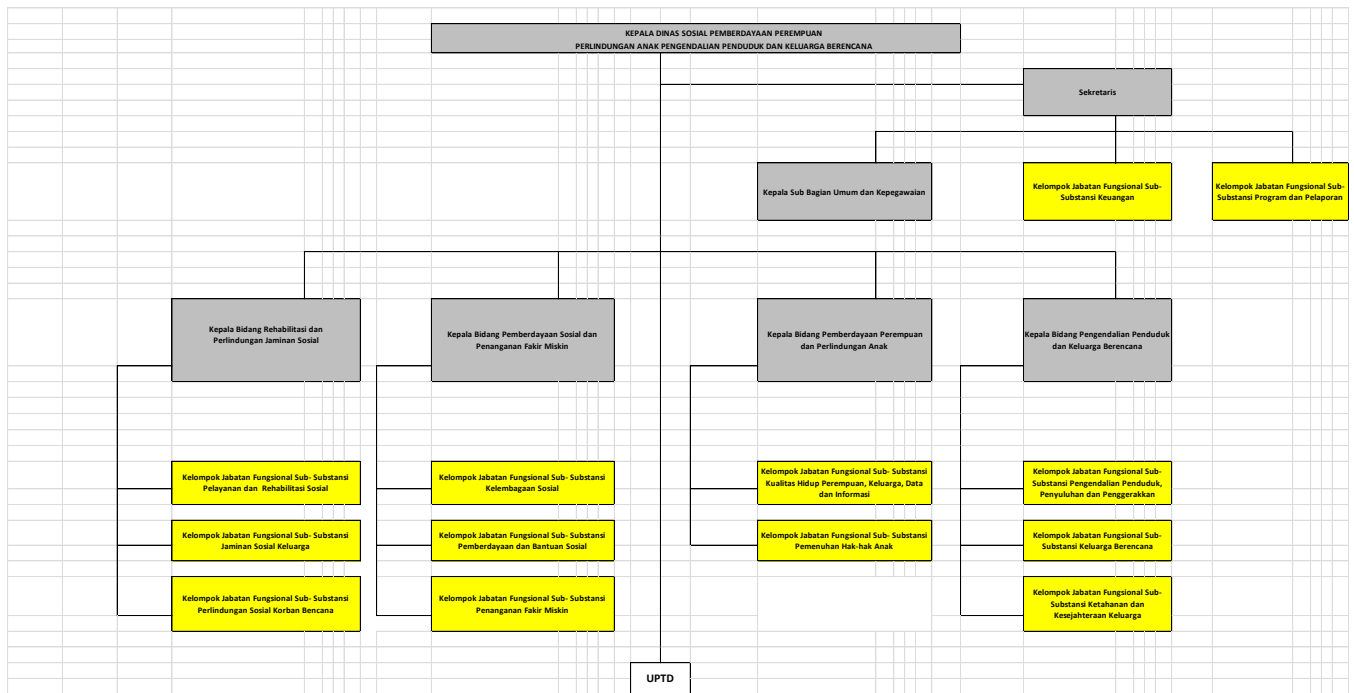
GAMBARAN PELAYANAN DINSOSP3APPKB

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DinsosP3APPKB

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

Selanjutnya Susunan Organisasi DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

2.1.1 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.

DinsosP3APPKB mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, maka DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari :

Adapun uraian tugas dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugasss membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah di bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

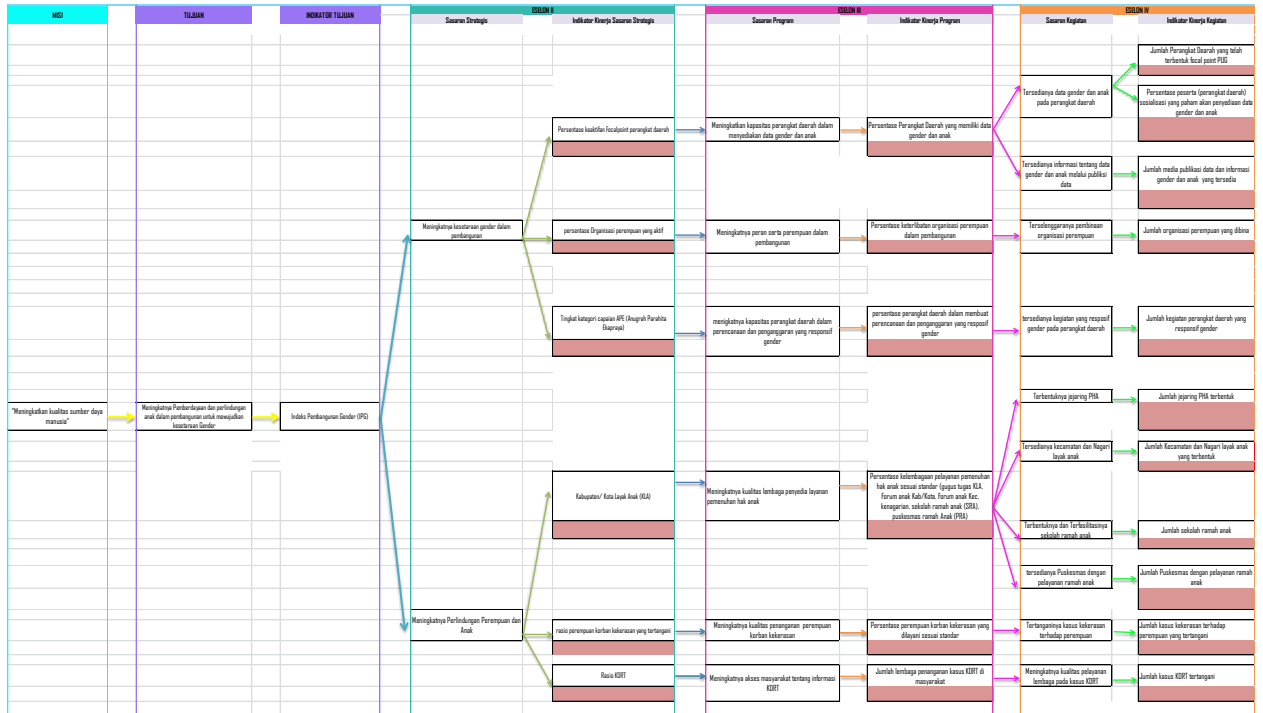
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan perencanaan, pendataan, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan yang meliputi pemantauan perkembangan pengarusutamaan gender dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

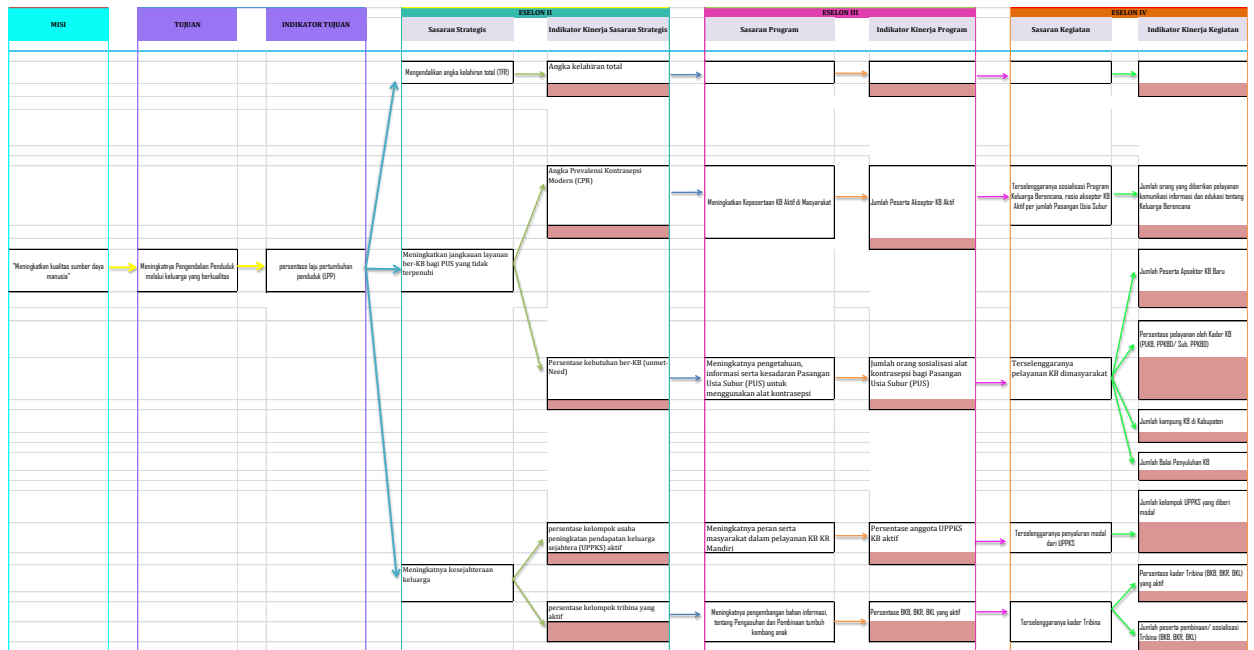
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak



C. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



2.3 Sumber Daya DinsosP3APPKB

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan di daerah kedepan. Untuk itu DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya setiap tahunnya telah terus menerus melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di DinsosP3APPKB dengan didukung sumber daya aparatur dan dukungan kapasitas asset/modal pendukung.

Adapun sumber daya aparatur dan sumber daya asset DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 sebagai berikut :

2.3.1 Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

Susunan Kepegawaian DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, golongan kepangkatan, dan eselon.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMA/ Sederajat	1	0	9	4	14
2	Diploma I	0	2	0	1	3
3	Diploma III	0	0	0	0	0
4	Sarjana	6	12	10	15	43
	Jumlah	7	14	19	20	60

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 60 Orang, dimana terbagi atas PNS sebanyak 21 orang dan Non PNS (THL, Honor Daerah) sebanyak 39 Orang. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai DINSOSP3APPKB adalah Sarjana.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pangkat/ Golongan di
DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	4	10	14
3	Golongan II	1	1	2
	Jumlah	7	14	21

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat pangkat/golongan yang ada di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 21 orang, dimana laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 14 orang dengan pangkat/golongannya yaitu Gol. IV ada 5 orang, Gol.III 14 orang dan Gol.II ada 2 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan di DINSOSP3APPKB
Kab. Dharmasraya Tahun 2021

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	-	1	1
4	JFT	3	5	8
4	Non Eselon/Staf	3	3	6
	Jumlah	7	14	21

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Pegawai berdasarkan tingkat jabatannya di DINSOSP3APPKB terdapat sebanyak 21 orang, dimana laki-laki sebanyak 7 orang termasuk staf dan perempuan sebanyak 14 orang juga termasuk staf. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang mempunyai jabatan Ess.II ada 1 orang, Ess III ada 5 orang, Ess IV ada 1 orang, JFT ada 8 orang dan Non Ess/staf ada 6 orang.

2.3.2 Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Aset)

Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan DINSOSP3APPKB Kab. Dharmasraya sangat terbatas sekali, seperti terlihat pada **Tabel 2.4** di bawah ini:

No.	Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah Tahun 2021	Kondisi (baik / Rusak)	Jumlah yang diinginkan tahun 2022
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	9	baik	9
2.	Sepeda Motor	Unit	32	baik	32
3.	Komputer PC	Unit	1	baik	5
4.	Laptop	Unit	13	2 rusak	21
5.	Printer	Unit	2	baik	5
6.	AC 2 PK	Unit	0	baik	6
7.	Tanah	km ²	0		
8.	Bangunan	Unit	0		3
9.	TV	Unit	2		2
10.	Fax	Unit	1	baik	1
11.	Infocus	Unit	0		2
12.	Screen	Unit	0		1
13.	Wireless	Unit	0		1
14.	Handycam	Unit	0		1

Sumber data: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

2.4 Kinerja DINSOSP3APPKB Kab.Dharmasraya

Berdasarkan gambaran kinerja dimana secara garis besarnya, hasil pencapaian (outcome) Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan target sasaran Rencana Strategis DINSOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2020, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Persentase PMKS yang tertangani

PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

$$\text{PMKS yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima bantuan}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya}} \times 100\%$$

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dari target (%) terealisasi (%). Hal ini dapat diartikan bahwa

dari seluruh PMKS ditargetkan sebanyak (orang) dari (orang) sudah ditangani.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

2. Persentase keaktifan *focalpoint*

Focal Point mempunyai tugas, sebagai berikut :

- ✓ Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- ✓ Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang Responsif Gender;
- ✓ Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
- ✓ Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
- ✓ Memfasilitasi penyusunan Profil Gender pada setiap SKPD;
- ✓ Mengkoordinir penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) pada beberapa kegiatan prioritas di SKPD yang bersumber dari APBD.

$$\text{Focal Point} = \frac{\text{Jumlah Focal Point}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Keberadaan *Focalpoint* Pengarusutamaan Gender bagi perangkat daerah sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan pada masing-masing SKPD yang terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya pada masing-masing OPD dan Instansi Vertikal serta memiliki pemahaman terhadap kerangka anggaran responsive gender.

3. Persentase organisasi perempuan yang aktif

$$\text{Organisasi Perempuan} = \frac{\text{Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Perempuan}} \times 100\%$$

Persentase Organisasi Perempuan yang aktif adalah sebesar (%) yang menjadi sasaran adalah organisasi perempuan yang telah terdata di Kantor Kesbang Pol.

4. Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)

adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan kriteria dan point sebagai berikut :

- ✓ 500 s/d 600 point untuk predikat Pratama
- ✓ 600 s/d 700 point untuk predikat Madya
- ✓ 700 s/d 800 point untuk predikat Nindya
- ✓ 800 s/d 900 point untuk predikat Utama
- ✓ Diatas 900 point untuk predikat Kabupaten/Kota Layak Anak

5. Rasio KDRT

$$\text{KDRT} = \frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Sebagian masyarakat menganggap bahwa KDRT apalagi masalah kekerasan di dalam rumah tangga masih merupakan tabu bagi keluarga dan tidak perlu di laporkan. Kasus KDRT ini merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan, upaya perlindungan harus dilakukan secara bersama dan terkoordinasi oleh masyarakat, aparat, dunia usaha dan media

6. Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani

$$\text{Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}} \times 100\%$$

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan layanan perlindungan perempuan dan anak di DinSosP3APPKB, sehingga perempuan korban kekerasan yang melapor ke unit pelayanan terpadu langsung dapat ditangani oleh petugas.

Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak salah satu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap

perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

7. Rasio anak korban kekerasan yang tertangani

$$\text{Rasio anak korban kekerasan yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan}} \times 100\%$$

Kegiatan promosi kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan layanan perlindungan perempuan dan anak, sehingga anak korban kekerasan yang melapor ke unit pelayanan terpadu langsung dapat ditangani oleh petugas pendamping.

Layanan perlindungan Perempuan dan Anak salah satu tugas dan fungsinya melakukan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan serta perlindungan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

C. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)

$$\text{CPR} = \frac{\text{Peserta KB katif (PA)}}{\text{Pasangan usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

Dengan Meningkatnya CPR akan menurunkan angka total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran.

9. Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Ingin Anak ditunda (IAT) + Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)}}{\text{Pasangan usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

Sebelum melakukan Pelayanan kontrasepsi diseluruh Kecamatan terlebih dahulu melakukan Peyuluhan Keluarga Berencana agar Masyarakat antusias untuk menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga angka kebutuhan ber KB yang tidak terlayani menurun dimana semakin rendah angka Unmet Need semakin tinggi prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR).

Adapun penyebab terjadinya Unmet Need adalah :

1. Jauhnya dari jangkauan Fasilitas Kesehatan dari Pelayanan KB.
2. Kurangnya Pengetahuan tentang Manfaat ber KB oleh Masyarakat yang ada di wilayah Perbatasan dan daerah terpencil.
3. Kurangnya Informasi tentang Program KKBPK yang diperoleh oleh Masyarakat Unmet Need tersebut.

10. Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif

UPPKS merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana.

$$\text{UPPKS} = \frac{\text{Jumlah Kelompok UPPKS yang aktif}}{\text{Jumlah Kelompok UPPKS yang ada}} \times 100\%$$

Tujuan:

- a. Untuk mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif,
- b. Untuk mensosialisasikan pengolahan keuangan keluarga,
- c. Untuk membantu meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga,
- d. Untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- e. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Keluarga

Pencapaian 100% dikarenakan adanya Kelompok UPPKS memberikan kesempatan keluarga yang berpendapatan rendah untuk berkreatifitas dan berinovasi menghasilkan suatu karya contohnya kerajinan tangan guna meningkatkan pendapatan keluarga melalui pembinaan di setiap kelompok UPPKS dan mitra kerja dengan pembinaan OPD (KUMPERDAG) dan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

Adapun faktor yang mendukung Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif adalah :

- Adanya Pembinaan pada Kelompok UPPKS
- Adanya bantuan dana dan alat media dari Provinsi pada kelompok Tri Bina
- Adanya Operasional Kader UPPKS

11. Persentase kelompok tribina yang aktif

Adanya pembinaan dan sosialisasi secara rutin ke setiap wilayah kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) di Kabupaten Dharmasraya serta dengan mengadakan pelatihan ke kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL).

$$\text{Tribina} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang aktif}}{\text{Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL) yang ada}} \times 100\%$$

Kelompok BKB Merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina keluarga balita. BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalau komunikasi defektif anatas orang tua dan anak remaja. Sedangkan BKL merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pangasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahetraannya.

Pembahasan pada kelompok BKB adalah penyuluhan/ Advokasi KIE Kecerdasan, komunikasi pasif, aktif dan gerakan Motorik. Pada kelompok BKR adalah penyuluhan/ Advokasi KIE komunikasi Orang tua dengan remaja, tentang Kebersihan dan kesehatan diri remaja, bina Keluarga Remaja dalam mewujudkan Generasi Berencana.

Sedangkan pembahasan BKL adalah penyuluhan/ Advokasi KIE 7 dimensi lansia tangguh ditinjau dari spritual, intelektual, fisik, sosialisasi dan lingkunganmewujudkan lansia tangguh dengan meningkatkan 8 fungsi agama, pembinaan fisik bagi lansia.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3APPKB
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2020

NO	Indikator	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase masyarakat miskin	Persen (%)	-	-	6,42	6,29	6,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen (%)	-	-	88,62	90,00	75,00
3	Persentase keaktifan focalpoint perangkat daerah	Persen (%)	-	-	44,11	100	100
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	Persen (%)	-	-	85,71	90,47	95,23
5	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	-	-	Inisiator	pratama	Tidak ada penilaian
6	Rasio KDRT	Persen (%)	-	-	0,01	0,002	0,002
7	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	Persen (%)	-	-	100	100	100
8	Rasio anak korban kekerasan yang tertangani	Persen (%)	-	-	100	100	100
9	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persen (%)	-	-	95,00	79,54	81,10

10	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	Persen (%)	-	-	100	10,75	10,29
11	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	Persen (%)	-	-	95,00	100	100
12	Persentase kelompok tribina yang aktif	Persen (%)	-	-	100	100	100
13	Hasil Penilaian AKIP DINSOSP3APPKB oleh Inspektorat	Nilai	-	-	B	BB	BB

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinsosP3APPKB

DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya mempunyai urusan wajib pelayanan dasar dalam pelayanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu :

Tabel 2.4
Tantangan Yang Mempengaruhi Pelayanan DINSOSP3APPKB

NO	Tantangan Pelayanan DINSOSP3APPKB
1	Kondisi geografi dan topografi daerah (luas, dataran rendah)
2	Kekurangan sarana/prasarana infrastruktur
3	Konsentrasi penduduk yang tidak merata
4	Rendahnya profesionalisme tenaga kerja yang ada
5	Masih besarnya jumlah pengangguran baik yang berpendidikan maupun tidak
6	Adanya kawasan yang rawan bencana alam
7	Rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
8	Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang KB terutama bagi keluarga miskin
9	Belum adanya <i>database</i> yang representatif tentang jumlah keluarga miskin
10	Masih sangat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
11	Rendahnya kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Nagari
12	Kurangnya tenaga fungsional pengelola program KB di lapangan
13	Rendahnya partisipasi pria dalam pemakaian alat kontrasepsi

Tabel 2.5
Peluang yang mempengaruhi Pelayanan DinsosP3APPKB

NO	Peluang Pelayanan DinsosP3APPKB
1	Adanya Program Pengembangan Kecamatan dan Program Nasional Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2	Adanya penduduk usia produktif yang berpendidikan S.1
3	Adanya program yang dikelola usaha-usaha berskala besar
4	Adanya lembaga/organisasi sosial yang menangani masalah sosial masyarakat, contoh: LK3
5	Adanya lembaga/organisasi sosial yang menangani masalah perempuan dan anak, contohnya: P2TP2A
6	Adanya pekerja sosial di masyarakat, contohnya: Peksos, TKSK, PSM
7	Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Perlindungan Anak.
8	Banyaknya petugas lapangan yang menangani masalah KB, contohnya: PKB/PLKB, PPKBN/Sub-PPKBN

2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

NO	Indikator	Target	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah warga Negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	20 orang	20 orang	19 orang	8 orang	104 orang
2	Jumlah Anak Terlantar memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	33 orang	39 orang	35 orang	41 orang	7 orang
3	Jumlah warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	50 orang	70 orang	50 orang	2 orang	9 orang
4	Jumlah warga Negara/ Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	20 orang	30 orang	31 orang	18 orang	17 orang
5	Jumlah warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	820 Jiwa/213 KK	1.086 Jiwa/734 KK	3.150 Jiwa/657 KK	3.069 Jiwa	15.015 jiwa/416 KK

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINSOSP3APPKB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinsosP3APPKB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DinsosP3APPKB dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase Penduduk Miskin	-	a. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;	a. memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TKSK sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal
2	Persentase PPKS yang tertangani	-	<p>b. Dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan suatu kendala dimana dengan adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan pengganti transportasi untuk PSM hanya 6 bulan dari 12 bulan dan TKSK sebanyak 6 bulan dari 12 bulan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dan pengambilan data kurang lancar;</p> <p>c. Masih ada ditemukan saldo kosong setiap bulannya;</p> <p>d. Masih belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri).</p> <p>e. Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan sebagai petugas pendata;</p> <p>f. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, disamping itu masyarakat juga masih belum mau untuk melaporkan</p>	<p>b. telah dilakukan koordinasi dengan pihak Himbara terkait saldo kosong dan mesin EDC yang belum tersedia di beberapa e-Warong. Saldo kosong disebabkan karena kartu hilang dan perubahan nomor rekening beberapa orang KPM. Untuk mesin EDC yang belum tersedia, tetap dipinjamkan disaat pencairan sembako setiap bulannya.</p> <p>c. dibuat Group WhatsApp agar komunikasi bisa dilakukan lebih intens antara petugas pendata, operator dengan pihak Kabupaten selaku fasilitator.</p> <p>d. dengan memberikan pembinaan secara intern kepada masyarakat dan pendekatan kepada pemuka-pemuka nagari serta memberikan sosialisasi kepada semua pihak tentang keberadaan LK3 dan LKKS.</p> <p>e. Menjelaskan bidang tupoksi Dinas Sosial kepada pimpinan tentang masa tanggap darurat bencana;</p>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>kasus-kasus yang belum terdampingi;</p> <p>g. Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas pendata setiap bulanya;</p> <p>h. Masih ada jorong dan Nagari yang belum melakukan verivali;</p> <p>i. Keterbatasan dana dan sarana prasarana (perahu karet dan kendaraan untuk kegiatan evakuasi) untuk penanggulangan bencana belum tersedia.</p> <p>j. SK Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat untuk Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini belum terbentuk.</p> <p>k. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap kesepakatan pembiayaan sarana dan prasarana untuk biaya service, penyediaan suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat tidak memadai.</p> <p>l. Kurangnya SDM yang membidangi masalah perlindungan anak (psikolog, psikiater, peksos professional)</p>	<p>f. Rapat koordinasi mendudukkan bidang tugas/tupoksi masing-masing OPD tentang bantuan dan masa tanggap darurat tanggap darurat/kebencanaan;</p> <p>g. Telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera baik logistik untuk bencana alam maupun logistik untuk bencana sosial;</p> <p>h. Telah terbentuknya Media Sosial melalui (WhatsApp Group) Team Reaksi Cepat Bencana Tingkat Kabupaten Dharmasraya dengan anggota mencapai 244 (dua ratus empat puluh empat) orang dengan anggota terdiri atas Bupati Dharmasraya, Kepala OPD Terkait beserta anggota yang terkait, Polisi, Tentara, Wartawan, Wali Nagari, Camat dan anggota Tagana.</p> <p>i. Sudah disampaikan tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah tentang dana sharring yang harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah</p> <p>j. Tugas bersama OPD terkait untuk</p>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>m. Belum adanya rumah aman/rumah singgah bagi anak-anak yang harus dilindungi.</p> <p>n. Angka anak putus sekolah tinggi, anggaran, sarana dan prasarana untuk melatih anak di tingkat kabupaten sangat-sangat terbatas.</p> <p>o. Belum adanya panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, padahal harapan masyarakat sangat tinggi terhadap adanya panti sosial milik Pemda.</p> <p>p. Kurang minatnya masyarakat untuk membuka panti-panti social.</p> <p>q. Masih adanya Lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini dikarenakan letak lokasi yang terlalu jauh, tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga masih memakai identitas yang lama.</p> <p>r. Anggaran/dana yang tidak mencukupi,</p>	<p>mengurangi masalah anak (Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Kesbangpol);</p> <p>k. Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang jaminan rahasia dan jaminan rasa aman apabila sudah melaporkan permasalahan ke petugas/aparat;</p> <p>l. Untuk penambahan petugas/SDM sudah diusulkan dalam permintaan formasi ke BKPSDM.</p> <p>m. Sudah berusaha mengajukan penambahan anggaran ke Tim Anggaran namun hasilnya nihil.</p> <p>n. Dukungan sarana dan prasarana juga sudah pernah diusulkan ke Tim Anggaran namunnya hasilnya juga nihil.</p> <p>o. Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang ikut sertanya masyarakat dalam pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang ada di lingkungannya.</p> <p>p. Sudah berusaha mengajukan penambahan anggaran ke Tim Anggaran namun hasilnya nihil.</p> <p>q. Sudah disampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas kependudukan bagi warga Lansia.</p>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>untuk kegiatan sosialisasi menghadapi masa lansia yang mandiri karena angka harapan hidup semakin lama semakin meningkat sehingganya akan muncul masalah sosial yang baru.</p> <p>s. Adanya paradigma masyarakat yang keliru bahwa masa lansia adalah masa menunggu ajal dan masa sudah tidak berguna.</p> <p>t. Banyak warga masyarakat yang masih mengeluh untuk bisa dimasukkan sebagai penerima program PKH.</p> <p>u. Masih banyaknya warga yang sebenarnya berhak masuk data BDT, namun belum terfasilitasi.</p>	<p>r. Bagi Lansia yang terlalu jauh jangkauan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan siap untuk melayani sampai dengan tingkat nagari, karena alat tidak bisa bongkar pasang.</p> <p>s. Membuat inovasi daerah berupa sekolah lanjut usia dengan tujuan untuk merubah paradigma yang salah dan mengorganisir kegiatan lansia yang sudah ada untuk lebih ditingkatkan dan didayagunakan.</p> <p>t. Semua Kementerian/Lembaga memakai DTKS dan kita sudah mengusulkan untuk penambahan penerima program PKH.</p> <p>u. Sudah berupaya untuk sosialisasi tentang perubahan data DTKS ke Nagari-Nagari.</p>
3	Persentase keaktifan <i>focalpoint</i> perangkat daerah	-	<p>a. Focal point masing-masing OPD belum maksimal mempromosikan PUG pada unit kerja.</p> <p>b. Proses Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing OPD secara umum belum menggunakan GAP dan GBS</p>	<p>a. Peningkatan pemahaman PUG melalui sosialisasi dan pelatihan pada Tim Focal Point OPD sehingga strategi PUG benar-benar dapat diterapkan dalam PPRG.</p> <p>b. Bersinergi dengan OPD terkait, lembaga, perguruan tinggi, LSM, dunia usaha dan media massa yang telah tergabung pada</p>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			c. Anggaran yang masih terbatas dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang responsif gender.	Forkomda PMP3A kabupaten Dharmasraya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan terhadap perempuan dan anak.
4	Persentase organisasi perempuan yang aktif	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak semua organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya memiliki akta pendirian dan terdaftar di Kesbangpol b. Masih kurangnya pemahaman organisasi perempuan dalam kepengurusan akta pendirian 	a. Mengupayakan desiminasi informasi kepada semua organisasi perempuan dalam kepengurusan akta
5	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya pemahaman, koordinasi, kerjasama tentang kegiatan Kabupaten Layak Anak pada OPD terkait; b. Masih kurangnya peran Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak; c. Belum semua sekolah dan puskesmas menginisiasi menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak; d. Keterlibatan forum anak dalam perencanaan anggaran masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait tentang kegiatan yang mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak; b. Melakukan sosialisasi Kabupaten Layak Anak pada Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha; c. Mendorong semua sekolah dan puskesmas untuk menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak; d. Melakukan diseminasi informasi kepada pemerintah kecamatan dan nagari untuk melibatkan forum anak dalam musrenbang
6	Rasio KDRT	-	a. Belum optimalnya kegiatan yang dapat	a. Mengupayakan kegiatan yang melibatkan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;</p> <p>b. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;</p> <p>c. Masih lemahnya jejaring dalam upaya perlindungan perempuan baik di tingkat di kecamatan dan nagari serta instansi terkait lainnya;</p> <p>d. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>masyarakat secara aktif terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk sosialisasi, jejaring dalam pelaporan dan penjangkauan kasus serta upaya pendampingan dan rehabilitasi terhadap perempuan korban tindak kekerasan.</p> <p>b. Mengupayakan kegiatan untuk meningkat koordinasi dengan lembaga-lembaga masyarakat serta instansi terkait dalam urusan perlindungan perempuan</p> <p>c. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana dalam kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun kapasitas sdm yang ada.</p>
7	Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	-	Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan;	Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
8	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	-	Masih tingginya angka putus sekolah di nagari / jorong/Kampung KB	a. Maksimalkan peran tenaga PKB/PLKB yang ada, sebanyak 20 orang yang berada di 11 kecamatan.
9	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (Unmet-Need)	-	<p>a. Kapasitas daerah;</p> <p>b. Unmet-need tinggi;</p> <p>c. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokon dan</p>	b. Ditanggulangi oleh tenaga dan puskesmas tempat pelayanan KB dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Interprestasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>asement kebutuhan berada di OPD lain (Dinkes).</p> <p>d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana.</p> <p>e. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam melaksanakan pelaporan dalam bentuk aplikasi serta tidak lancarnya jaringan internet di tempat kerja masing-masing petugas lapangan</p>	<p>KB dan kesehatan reproduksi perlu ditangani oleh tenaga yang profesional dan telah mendapatkan pelatihan CTU.</p> <p>c. Dilakukan pelayanan GALCINTASTRAN (Daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan transmigrasi).</p> <p>d. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dimaksimalkan penyuluhan Program KKBPK oleh PKB/PLKB dan kader KB di Jorong dan nagari.</p>
10	Persentase kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	-	<p>a. Sebaran penduduk yang tidak merata di Kab. Dharmasraya</p> <p>b. Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi;</p> <p>c. Bonus demografi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan);</p>	
11	Persentase kelompok tribina yang aktif	-	Masih kurangnya ratio tenaga penyuluh KB di lini lapangan yang aktif	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya”**.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai Agama, Adat, dan Budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 2 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”, dan misi ke 3 “Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing”.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Visi: “Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya yang Mandiri Maju dan Berbudaya”			
	Misi ke 3 : Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
SOSIAL				
1	Program Pemberdayaan Sosial dan penanganan	▪ adanya keterbatasan anggaran mengakibatkan	▪ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran	▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk

	fakir miskin	<p>pengganti transportasi untuk PSM hanya 6 bulan dari 12 bulan dan TKSK sebanyak 6 bulan dari 12 bulan, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan dan pengambilan data kurang lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih ada ditemukan saldo kosong setiap bulannya ▪ Masih belum lengkapnya mesin EDC yang disediakan di E-Warong oleh pihak Himbara (Bank Mandiri). ▪ Masih banyaknya petugas yang kurang paham dengan tugas yang akan mereka kerjakan sebagai petugas pendata; ▪ Belum terakomodirnya anggaran untuk petugas pendata setiap bulannya; ▪ Masih ada jorong dan Nagari yang belum melakukan verifikasi. 	<p>pembinaan PPKS belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurang pemahamannya masyarakat akan pembinaan PPKS 	<p>meningkatkan kesejahteraan social</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ memberikan pembinaan secara berkala serta memberikan motivasi terhadap PSM dan TKSK sehingga Tenaga Relawan dilapangan bisa bekerja secara maksimal. ▪ telah dilakukan koordinasi dengan pihak Himbara terkait saldo kosong dan mesin EDC yang belum tersedia di beberapa e-Warong. Saldo kosong disebabkan karena kartu hilang dan perubahan nomor rekening beberapa orang KPM. Untuk mesin EDC yang belum tersedia, tetap dipinjamkan disaat pencairan sembako setiap bulannya.
2	Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan dana dan sarana prasarana (perahu karet dan kendaraan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi

		<p>kegiatan evakuasi) untuk penanggulangan bencana belum tersedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat untuk Kabupaten Dharmasraya sampai saat ini belum terbentuk. ▪ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap kesepakatan pembiayaan sarana dan prasarana untuk biaya service, penyediaan suku cadang dan pembayaran pajak kendaraan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat tidak memadai. ▪ Anggaran/dana yang tidak mencukupi, untuk kegiatan sosialisasi menghadapi masa lansia yang mandiri karena angka harapan hidup semakin lama semakin meningkat sehingganya akan muncul masalah sosial yang baru. 		<p>Sumatera baik logistik untuk bencana alam maupun logistik untuk bencana sosial;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah terbentuknya Media Sosial melalui (WhatsApp Group) Team Reaksi Cepat Bencana Tingkat Kabupaten Dharmasraya dengan anggota mencapai 244 (dua ratus empat puluh empat) orang dengan anggota terdiri atas Bupati Dharmasraya, Kepala OPD Terkait beserta anggota yang terkait, Polisi, Tentara, Wartawan, Wali Nagari, Camat dan anggota Tagana. ▪ Membuat inovasi daerah berupa sekolah lanjut usia dengan tujuan untuk merubah paradigma yang salah dan mengorganisir kegiatan lansia yang sudah ada untuk lebih ditingkatkan dan didayagunakan.
	Misi ke 2 :			
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
No	Misi dan	Permasalahan	Faktor	

	Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Focal point masing-masing OPD belum maksimal mempromosikan PUG pada unit kerja. ▪ Proses Perencanaan dan Penganggaran pada masing-masing OPD secara umum belum menggunakan GAP dan GBS ▪ Anggaran yang masih terbatas dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. ▪ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender ▪ Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan ▪ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya ratio tenaga penyuluh KB di lini lapangan. ▪ Sangat minimnya obat set efek untuk pemasangan alat kontrasepsi yang tidak disediakan oleh BKKBN Perwakilan Sumatera Barat. ▪ Sebaran penduduk yang tidak merata di Kab. Dharmasraya. ▪ Masih kurangnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran ber-KB belum optimal. ▪ Terbatasnya anggaran program untuk mendukung program KB dan pelayanan alkon ▪ Terbatasnya tenaga penyuluh KB 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan KB ▪ Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait ▪ Adanya komitmen

		<p>pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya pemahaman petugas dalam melaksanakan pelaporan dalam bentuk aplikasi serta tidak lancarnya jaringan internet di tempat kerja masing-masing petugas lapangan. ▪ Masih tingginya angka putus sekolah di nagari / jorong/Kampung KB 	<p>dan tenaga pendamping kelompok tribina</p>	<p>kepala daerah untuk mengembangkan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>
--	--	---	---	---

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan peruntukan pembangunan dan pengembangan kawasan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian untuk kajian lingkungan hidup strategis, Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DinsosP3APPKB tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	KETERANGAN
Capaian : SB (Target tidak tercapai)					
1	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik	⇒ Pengembangan regulasi pelayanan publik yang inklusif ⇒ Peningkatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas ⇒ Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan ⇒ Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas	Program : Rehabilitasi sosial Sub Program : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
2	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1. Meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data DTKS sebagai syarat penerima bantuan tunai bersyarat/PKH ⇒ 2. Meningkatkan kemandirian keluarga penerima PKH	1. Peningkatan kemampuan petugas pendata DTKS 2. Pengembangan regulasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data 3. Peningkatan sarana verifikasi dan validasi data 1. Peningkatan kualitas pendampingan terhadap penerima PKH	Program : perlindungan dan jaminan sosial Sub Program : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
3	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Mengembangkan tata kelola penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	1. Peningkatan kemampuan petugas dalam penyediaan layanan tanggap bencana (tagana) 2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan tanggap bencana 3. Peningkatan koordinasi system layanan tanggap bencana 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Program : penanganan bencana Sub Program : 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

4	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial	⇒ Peningkatan kualitas SDM tenaga pendamping korban bencana social ⇒ Peningkatan sarana dan prasarana pendampingan psikososial ⇒ Peningkatan partisipasi masyarakat lokal	Program : Penanganan bencana Sub Program :Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
5	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan keterlibatan PUS dalam berKB	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap program KB 2. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh KB di Kecamatan dan kader KB 3. Peningkatan akses terhadap layanan KB 4. Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB 6. Pengembangan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 7. Pengembangan system insentif dan des intensif terhadap peserta KB	Program : pembinaan keluarga berencana (kb) Sub Program : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
6	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan kesetaraan jender dalam pembangunan	1. Penguatan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan 2. Pengembangan regulasi berbasis gender 3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik 4. Peningkatan kapasitas SDM perempuan	2 08 02 Pemberdayaan perempuan	

7	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatkan kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ peningkatan pengetahuan masyarakat tentang usia kawin ⇒ Penguatan regulasi tentang usia kawin pertama ⇒ Penguatan peran ninik mamak di kaumnya tentang usia kawin pertama bagi anak kemenakannya ⇒ Peningkatan kualitas kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A ⇒ Peningkatan lama sekolah 	Program perlindungan perempuan	
8	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pelayanan KB 2. Peningkatan kualitas pelayanan KB 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB 4. Penguatan regulasi tentang program KB 5. Peningkatan Pengendalian pengelolaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang KB 2. Pengembangan Pengembangan system insentif dan disentif terhadap peserta KB 3. Peningkatan peran ninik mamak dan alim ulama 	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)	

9	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program KB	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Peningkatan kualitas dan frekuensi penyuluhan dan konseling KB ⇒ Pengembangan sarana edukasi penyuluhan KB ⇒ Pendampingan Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui kampung KB ⇒ Pengembangan konseling pranikah 	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)	
10	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatkan kesempatan pengembangan karir perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan 2. Peningkatan advokasi pada pengambil kebijakan tentang pengembangan karir perempuan 	5.04 pendidikan dan Pelatihan 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.04.02.2.02.01 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM
Capaian : NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)					
11	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang hidup di bawah 50 persen berdasarkan Kesetaraan Gender dan inklusif ⇒	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi dan regulasi ketersediaan data 2. Peningkatan penyediaan lapangan kerja berbasis gender dan inklusif 3. Peningkatan akses permodalan bagi disabilitas dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengarus utamaan gender dan 2. Pemberdayaan perempuan Program peningkatan kualitas keluarga 	

12	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Meningkatkan kualitas keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi sehat 2. Peningkatan koordinasi dan regulasi ketersediaan data berbasis gender 3. Pendewasaan usia kawin 4. Peningkatan pembangunan keluarga dan genre 5. Peningkatan kerjasama dengan kemenag tentang kesehatan reproduksi 6. Peningkatan pengetahuan kelompok sasaran terhadap reproduksi sehat dan program KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 08 04 Program peningkatan kualitas keluarga 2. 2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb) 	Arahnya Kesehatan perempuan
13	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Meningkatkan pengembangan perlindungan anak dan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan edukasi pada kelompok sasaran tentang hak anak dan perempuan 2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait 3. Penguatan implementasi regulasi perlindungan anak dan perempuan <p>⇒ ⇒ ⇒ ⇒</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 08 03 program perlindungan perempuan 2. 2 08 07 program perlindungan khusus anak 	Arahnya Perlindungan anak dan perempuan
14	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Merevitalisasi kearifan lokal dalam pengembangan hubungan sosial dan keagamaan di masyarakat	<p>⇒ Pengembangan kualitas pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal</p> <p>⇒ Peningkatan peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama</p> <p>⇒ Penguatan kelembagaan lokal</p> <p>⇒ Peningkatan kemampuan SDM penyelenggara program terkait</p>	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)	
Isu dari hasil konsultasi public					
1	-				

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Sosial

- a. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Banyaknya Potensi Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif;
- c. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti;
- d. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi bagi fakir miskin;
- e. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- b. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat

tentang upaya pencegahan serta penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

- c. Masih lemahnya jejaring dalam upaya perlindungan perempuan baik di tingkat di kecamatan dan nagari serta instansi terkait lainnya.
- d. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
- e. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) utamanya pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih perlu ditingkatkan;
- f. Masih kurangnya pemahaman, koordinasi, kerjasama tentang kegiatan Kabupaten Layak Anak pada OPD terkait;
- g. Masih kurangnya peran Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mendukung percepatan Kabupaten Layak Anak;
- h. Belum semua sekolah dan puskesmas menginisiasi menjadi sekolah dan puskesmas ramah anak;
- i. Keterlibatan forum anak dalam perencanaan anggaran masih terbatas.
- j. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif.

3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Masih kurangnya ratio tenaga penyuluh KB di lini lapangan.
- b. Sangat minimnya obat set efek untuk pemasangan alat kontrasepsi yang tidak disediakan oleh BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.
- c. Sebaran penduduk yang tidak merata di Kab. Dharmasraya.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program Bangga Kencana.
- e. Masih kurangnya pemahaman petugas dalam melaksanakan pelaporan dalam bentuk aplikasi serta tidak lancarnya jaringan internet di tempat kerja masing-masing petugas lapangan.
- f. Masih tingginya angka putus sekolah di nagari / jorong/Kampung KB

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinsosP3APPKB

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DinsosP3APPKB diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Bidang Sosial

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Sosial memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengurangi Kemiskinan

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial
2. penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana

1.1.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

1.1.3 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk melalui keluarga yang berkualitas

Sasaran yang dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi
3. meningkatnya kesejahteraan keluarga

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DinsosP3APPKB Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel **4.1** terlampir.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan PD

5.1.1 Strategi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi dari DinsosP3APPKB adalah:

1. Sosial

- a. Meningkatkan penanganan PPKS melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PPKS;
- b. Peningkatan Pelayanan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana.
- c. Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang;
- b. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang perspektif Gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan PPRG;
- c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- d. meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemda, Ormas, Lembaga Masyarakat, dan Dunia usaha, tentang KLA;
- e. memberikan pendampingan teknis untuk penguatan kelembagaan dalam rangka menjadikan Kab. Dharmasraya menjadi Kab. Layak Anak;
- f. meningkatkan efektifitas, kapasitas kelembagaan serta penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO.

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan KB;
- c. Meningkatkan pelayanan KB pada masyarakat secara merata;

4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
- b. Peningkatan kapasitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi birokrasi
- c. peningkatan kualitas penerapan 5 komponen SAKIP di OPD

5.1.2 Arah Kebijakan

Untuk menjawab segala tantangan dan perubahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan dalam sub-bab terdahulu, perlu ditetapkan kebijakan yang dipandang relevan sebagai berikut :

1. Sosial

- a. Mengembangkan tatakelola dan menyetarakan kebijakan untuk penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut masalah kemiskinan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana;
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan;
- e. Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG, dan

- pendampingan implementasi PPRG;
- b. Penguatan sistem penyediaan pemuktahiran dan pemanfaatan data Gender terpilih;
 - c. optimalisasi program pemberdayaan perempuan;
 - d. penguatan lembaga/jejaring PUG di daerah;
 - e. melakukan sosialisasi Bimtek tentang KLA;
 - f. mengarahkan Ormas, Lembaga Masyarakat, dan Dunia usaha, melakukan kegiatan untuk pemenuhan hak anak;
 - g. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak; optimisasi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak.

3. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- a. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana;
- b. pengadaan dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
- c. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- e. Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi remaja untuk peningkatan pengetahuan dalam pendidikan.

4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (mental aparatur, Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-

undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan public.

- b. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang Reformasi Birokrasi
- d. Pemberian *Reward and Punnishment* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- e. Penilaian tenaga teladan di Lembaga OPD
- f. peningkatan kualitas perencanaan OPD
- g. peningkatan kualitas evaluasi internal OPD
- h. peningkatan kualitas indikator kinerja OPD
- i. peningkatan capaian kinerja OPD
- j. peningkatan kualitas laporan kinerja OPD

Secara rinci tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan DinsosP3APPKB Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel **5.1** terlampir.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, guna mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah dan strategi pembangunan sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada Tabel **6. 1**. Terlampir. :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari segi sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pengendalian pada Anak, serta keluarga yang berkualitas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau tingkat keberhasilan DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, harus ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik itu kondisi riil saat ini serta memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi kinerja badan perencanaan daerah ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) badan perencanaan itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Penetapan indikator kinerja DinsosP3APPKB dengan mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel **7.1** terlampir.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis OPD tahun 2021-2026 ini, DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya telah memiliki pedoman dan acuan untuk mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam pengambilan langkah dan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana, terkoordinasi dan harmonis dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025. Penyusunan rencana strategis ini diupayakan semaksimalnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan masih banyak kekurangan-kekurangan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra DinsosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DinsosP3APPKB agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DinsosP3APPKB dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra DinsosP3APPKB akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DinsosP3APPKB yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DinsosP3APPKB wajib berpedoman pada Renstra DinsosP3APPKB.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DinsosP3APPKB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DinsosP3APPKB sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pulau Punjung,

2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Anak dan Keluarga
Berencana (DINSOSP3APPKB)



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINSOSP3APPKB
TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET KINERJA SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3			Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing								
Tujuan RPJMD			Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing								
Sasaran RPJMD			Mengurangi kemiskinan								
BIDANG SOSIAL											
1	Mengurangi Kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	%	6,23	6,29	6,23	6,18	6,14	6,10	6,05
		Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	75	78	80	82	85	88	90
		penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP DINSOSP3APPKB	Nilai/Pre dikat	BB (75,8)	BB (76,39)	BB (77,312)	BB (78,234)	BB (79,156)	A (80,078)	A (81)
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DINSOSP3APPKB	Nilai	N/A	64,9	68,7	71,4	74,2	77,0	80,0	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Awal 2020	TARGET KINERJA SASARAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	80	80,5	81	81,5	82	82,5	
Misi 2		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia										
Tujuan RPJMD		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia										
Sasaran RPJMD		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan										
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	88,29	88,35	88,43	88,26	88,45	88,50	88,55	
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			persentase Organisasi perempuan yang aktif	%	95,23	95,23	96	98	100	100	100	100
			Tingkat kategori capaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Predikat/ Nilai	-	-	Pratama	-	Pratama	-	Madya	
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/ Nilai	tidak ada penilaian	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
			rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
			Rasio KDRT	%	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	
Misi 2		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia										
Tujuan RPJMD		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia										
Sasaran RPJMD		Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat										
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk melalui keluarga yang berkualitas		persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,86	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,55	
		Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (TFR)	%	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62	2,59	2,56	
		Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	%	81,10	81,15	81,20	81,25	81,30	81,35	81,40	
			Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,29	10,27	10,25	10,23	10,21	10,18	10,16	

Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021-2026

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya".

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
SOSIAL				
MISI 3: Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing				
1	Mengurangi Kemiskinan	Menurunnya masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan penanganan PPKS melalui kerjasama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PPKS	Mengembangkan tatakelola dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut masalah kemiskinan
		Pelayanan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Peningkatan Pelayanan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana
			Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan
				Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatkan peran dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG, dan pendampingan implementasi PPRG
			Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang perspektif Gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan PPRG	Penguatan sistem penyediaan pemuktahiran dan pemanfaatan data Gender terpilih
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan	optimalisasi program pemberdayaan perempuan penguatan lembaga/jejaring PUG di daerah
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	meningkatkan pemahaman dan komitmen Pemda, Ormas, Lembaga Masyarakat, dan Dunia usaha, tentang KLA memberikan pendampingan teknis untuk penguatan kelembagaan dalam rangka menjadikan Kab. Dharmasraya menjadi Kab. Layak Anak	melakukan sosialisasi Bimtek tentang KLA mengarahkan Ormas, Lembaga Masyarakat, dan Dunia usaha, melakukan kegiatan untuk pemenuhan hak anak
	meningkatkan efektifitas, kapasitas kelembagaan serta penanganan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO	a. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak; b. optimisasi kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; c. Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak.		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				

Visi: "Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju yang Mandiri dan Berbudaya".

MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk melalui keluarga yang berkualitas	Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur	Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur Meningkatkan kualitas pelayanan KB	pengadaan dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Meningkatkan pelayanan KB pada masyarakat secara merata	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi remaja untuk peningkatan pengetahuan dalam pendidikan

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	a. Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (mental aparatur, Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan public b. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Peningkatan kapasitas SDM atau TIM yang mendukung pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi birokrasi	a. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang Reformasi Birokrasi b. Pemberian Reward and Punnishment dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Penilaian tenaga teladan di Lembaga OPD
			peningkatan kualitas penerapan 5 komponen sapis di OPD	a. peningkatan kualitas perencanaan OPD b. peningkatan kualitas evaluasi internal OPD c. peningkatan kualitas indikator kinerja OPD d. peningkatan capaian kinerja OPD e. peningkatan kualitas laporan kinerja OPD

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINSOSP3APPKB
KABUPATEN DHARMASRAYA**

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung jawab	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		2025				2026		akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
BIDANG SOSIAL																								
Mengurangi Kemiskinan	Memurahnya masalah Kesejahteraan Sosial			Persentase Penduduk Miskin	persentase	0	6,29	21.027.149.500	6,23	4.729.500.000	6,18	5.082.000.000	6,14	5.452.500.000	6,1	5.880.000.000	6,05	6.277.500.000	6,05	6.495.000.000	DINSOSP3APPKB			
				Persentase PPKS yang tertangani	persentase	0	78	186.030.900	80	2.850.000.000	82	3.200.000.000	85	3.450.000.000	88	3.725.000.000	90	3.975.000.000	90	4.075.000.000	DINSOSP3APPKB			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase kesejahteraan sosial	persentase	0	80	115.993.150	85	1.350.000.000	90	1.600.000.000	95	1.750.000.000	100	1.875.000.000	100	2.075.000.000	100	2.075.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang terlatih	persentase	0	0	-	85	300.000.000	90	400.000.000	92	400.000.000	95	450.000.000	97	475.000.000	100	475.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya Pemberdayaan KAT	hektar	0	0	-	85	200.000.000	90	250.000.000	92	250.000.000	95	275.000.000	97	275.000.000	100	275.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pendampingan terhadap KAT	persentase	0	0	-	85	100.000.000	90	150.000.000	92	150.000.000	95	175.000.000	97	200.000.000	100	200.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin UGB dan PUB	persentase	0	0	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan	Jumlah Izin UGB dan PUB	dolumen	0	0	-	5	150.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	100	200.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Persentase PSKS yang terlatih	persentase	0	0	115.993.150	85	900.000.000	90	1.050.000.000	92	1.175.000.000	95	1.225.000.000	97	1.400.000.000	100	1.400.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Jumlah PSM yang terlatih	orang	0	0	-	52	200.000.000	52	250.000.000	52	275.000.000	52	275.000.000	52	300.000.000	100	300.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Jumlah TKSK yang Terlatih	orang	0	11	65.323.200	11	250.000.000	11	275.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	11	300.000.000	100	300.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah PSKS Keluarga yang terlatih dan LKKS	orang	0	0	-	50	150.000.000	50	175.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	250.000.000	100	250.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terlatih	LKS	0	50	18.338.900	13	150.000.000	13	175.000.000	13	200.000.000	15	200.000.000	15	300.000.000	100	300.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Jumlah SDM LK3 yang terlatih	orang	0	100	32.331.050	30	150.000.000	30	175.000.000	30	200.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	100	250.000.000	DINSOSP3APPKB		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	persentase	0	70	70.037.750	80	1.500.000.000	82	1.600.000.000	82	1.700.000.000	85	1.850.000.000	88	1.900.000.000	88	2.000.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	terverifikasi dan validasi data DTKS Kab. Dharmasraya	persentase	0	80	70.037.750	85	1.500.000.000	90	1.600.000.000	95	1.700.000.000	100	1.850.000.000	100	1.900.000.000	100	2.000.000.000	DINSOSP3APPKB		
				fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH yang difasilitasi	KPM	0	4466	16.623.400	4466	500.000.000	5000	550.000.000	5200	600.000.000	5400	650.000.000	5600	700.000.000	5800	750.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	persentase	0	80	53.414.350	100	600.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	persentase	0	80	-	100	400.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	DINSOSP3APPKB		
			penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana			Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persentase	0	100	20.605.168.600	100	979.500.000	100	1.157.000.000	100	1.252.500.000	100	1.380.000.000	100	1.502.500.000	100	1.595.000.000	DINSOSP3APPKB	
						Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	persentase	0	100	235.950.000	100	900.000.000	100	725.000.000	100	750.000.000	100	775.000.000	100	800.000.000	100	825.000.000	DINSOSP3APPKB	
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	persentase	0	100	20.605.168.600	100	979.500.000	100	1.157.000.000	100	1.252.500.000	100	1.380.000.000	100	1.502.500.000	100	1.595.000.000	DINSOSP3APPKB	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	persentase	0	100	20.325.168.600	100	549.500.000	100	667.000.000	100	722.500.000	100	790.000.000	100	860.000.000	100	870.000.000	DINSOSP3APPKB	
					Penyediaan Permakanaan	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	paket	0	238	35.700.000	420	105.000.000	440	110.000.000	450	115.000.000	500	125.000.000	550	137.500.000	600	150.000.000	DINSOSP3APPKB	
					penyediaan sandang	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima paket sandang	orang	0	0	-	35	50.000.000	40	55.000.000	45	60.000.000	50	65.000.000	55	70.000.000	60	75.000.000	DINSOSP3APPKB	
		Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memanfaatkan alat bantu	unit	0	15	15.200.000	20	25.000.000	25	40.000.000	30	45.000.000	35	55.000.000	40	65.000.000	45	75.000.000	DINSOSP3APPKB			
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	orang	0	10	5.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	30	30.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	DINSOSP3APPKB			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial	orang	0	0	-	35	50.000.000	40	60.000.000	45	70.000.000	50	80.000.000	55	90.000.000	60	100.000.000	DINSOSP3APPKB			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	orang	0	200	16.536.500	500	50.000.000	600	110.000.000	650	115.000.000	700	120.000.000	750	125.000.000	800	130.000.000	DINSOSP3APPKB			
		fasilitasi pembuatan nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan KIA (kartu identitas anak)	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen	orang	0	2	5.000.000	3	7.500.000	4	10.000.000	5	12.500.000	6	15.000.000	7	17.500.000	8	20.000.000	DINSOSP3APPKB				
		pemberian akses pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan	orang	0	35	-	35	50.000.000	40	60.000.000	45	70.000.000	50	80.000.000	55	90.000.000	60	100.000.000	DINSOSP3APPKB				

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	LOKASI	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		akhir periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.06.04.201.09	pemberian layanan data dan pengaduan	jumlah layanan data pengaduan yang dimiliki	unit	0	1	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.201.10	pemberian layanan kedaruratan	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	0	1	-	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.201.31	pemberian pelayanan penelusuran keluarga	jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	0	10	5.000.000	10	5.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	18	20.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.201.32	pemberian layanan rujukan	jumlah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dirujuk	orang	0	5	11.622.500	20	52.000.000	20	52.000.000	22	55.000.000	22	55.000.000	24	60.000.000	24	60.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	persentase	0	10	280.000.000	10	430.000.000	10	490.000.000	10	530.000.000	10	590.000.000	10	642.500.000	10	725.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.02	Layanan Kedaruratan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dijangkau	orang	0	35	50.000.000	35	50.000.000	40	55.000.000	45	60.000.000	50	65.000.000	55	70.000.000	60	75.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.03	Penyediaan Permakanan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima paket permakanan sesuai NAPZA	orang	0	200	75.000.000	350	105.000.000	400	110.000.000	450	115.000.000	500	125.000.000	550	137.500.000	600	150.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.05	Penyediaan Alat Bantu	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memanfaatkan alat bantu	orang	0	10	15.000.000	20	25.000.000	25	40.000.000	30	45.000.000	35	55.000.000	40	65.000.000	45	75.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.13	Layanan Rujukan	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dirujuk	orang	0	10	25.000.000	20	50.000.000	25	55.000.000	25	55.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA direunifikasi dengan keluarga	orang	0	10	15.000.000	30	15.000.000	30	20.000.000	30	30.000.000	30	40.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bimbingan fisik, mental	orang	0	20	50.000.000	35	50.000.000	40	60.000.000	45	70.000.000	50	80.000.000	55	90.000.000	60	100.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	orang	0	400	50.000.000	500	100.000.000	600	110.000.000	650	115.000.000	700	120.000.000	750	125.000.000	800	130.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.06	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial Kabupaten/kota	jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	0	0	-	3	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	10	50.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.04.202.14	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	jumlah lembaga dan kemitraan yang terbentuk	lembaga	0	0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	persentase	0	100	235.950.000	100	900.000.000	100	725.000.000	100	750.000.000	100	775.000.000	100	800.000.000	100	825.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201	Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	persentase	0	100	202.967.500	100	800.000.000	100	620.000.000	100	640.000.000	100	660.000.000	100	680.000.000	100	700.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201.01	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan makan	korban	0	1000	202.967.500	1000	200.000.000	1000	210.000.000	1000	220.000.000	1000	230.000.000	1000	240.000.000	1000	250.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201.02	Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	korban	0	0	-	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	0	13	-	13	325.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	13	130.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201.04	Penganganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket pemakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	0	0	-	50	25.000.000	60	30.000.000	70	35.000.000	80	40.000.000	90	45.000.000	100	50.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.201.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan psikososial	korban	0	1000	-	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	55.000.000	1000	60.000.000	1000	65.000.000	1000	70.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota	persentase	0	100	32.982.500	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	DINSOSP3APPKB		
		1.06.06.202.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah Relawan Sosial Taruna Siaga Bencana yang meningkat kemampuan dan skillnya dalam penanganan bencana	orang	0	21	32.982.500	21	100.000.000	21	105.000.000	21	110.000.000	21	115.000.000	21	120.000.000	21	125.000.000	DINSOSP3APPKB		
BIDANG SEKRETARIAT																							
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat /Nilai	0	88 (76,39)	4.740.814.900	88 (77,312)	5.212.287.570	88 (78,234)	5.727.807.507	88 (79,156)	6.315.737.438	A (80,078)	6.915.402.361	A (81)	7.573.933.778	A (81)	8.297.218.335	DINSOSP3APPKB		
				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DINSOSP3APPKB	Nilai	0	21,7	4.740.814.900	27,3	5.212.287.570	32,2	5.727.807.507	37	6.315.737.438	46,1	6.915.402.361	46,1	7.573.933.778	46,1	8.297.218.335	DINSOSP3APPKB		
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	80	4.740.814.900	80,5	5.212.287.570	81	5.727.807.507	81,5	6.315.737.438	82	6.915.402.361	82,5	7.573.933.778	82,5	8.297.218.335	DINSOSP3APPKB		
		01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan administrasi perkantoran	persentase	0	100	4.740.814.900	100	5.212.287.570	100	5.727.807.507	100	6.315.737.438	100	6.915.402.361	100	7.573.933.778	100	8.297.218.335	DINSOSP3APPKB	
		01.201		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja DINSOSP3APPKB	persentase	0	100	60.000.000	100	90.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	180.000.000	DINSOSP3APPKB	
		01.201.02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Terusunnya dokumen RKA DINSOSP3APPKB	dokumen	0	0	20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	DINSOSP3APPKB	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	LOKASI			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				akhir periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		01.201.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya perencanaan dan Pelaporan	dokumen	0	0	40.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	DINSOSP3APPKB		
		01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya keuangan perangkat daerah	bulan	0	14	3.141.924.000	14	3.456.116.400	14	3.801.728.040	14	4.181.900.844	14	4.600.090.928	14	5.060.100.021		5.566.110.023	DINSOSP3APPKB		
		01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran tambahan penghasilan ASN	bulan	0	14	3.141.924.000	14	3.456.116.400	14	3.801.728.040	14	4.181.900.844	14	4.600.090.928	14	5.060.100.021	14	5.566.110.023	DINSOSP3APPKB		
		01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan administrasi perkantoran	persentase	0	100	231.890.900	100	244.101.170	100	257.532.467	100	296.264.894	100	314.912.563	100	335.424.999	100	357.988.679	DINSOSP3APPKB		
		01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat listrik; lampu, kabel	paket	0	1	10.100.000	1	11.110.000	1	12.221.000	1	13.443.100	1	14.787.410	1	16.266.151	1	17.892.766	DINSOSP3APPKB		
		01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	paket	0	1	50.002.000	1	50.002.000	1	50.002.000	1	50.002.000	1	50.002.000	1	50.002.000	1	50.002.000	DINSOSP3APPKB		
		01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	paket	0	1	7.998.500	1	8.798.350	1	9.678.185	1	10.646.004	1	11.710.604	1	12.881.664	1	14.169.821	DINSOSP3APPKB		
		01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	paket	0	800	24.000.000	100	26.400.000	120	29.040.000	140	31.944.000	160	35.138.400	180	38.652.240		42.517.464	DINSOSP3APPKB		
		01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	tersedianya barang cetak dan pengandaan	kegiatan	0	1	59.786.200	1	59.786.200	1	59.786.200	1	59.786.200	1	59.786.200	1	59.786.200	1	59.786.200	DINSOSP3APPKB		
		01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	tahun	0	1	80.004.200	1	88.004.620	1	96.805.082	1	106.485.590	1	117.134.149	1	128.847.564	1	141.732.321	DINSOSP3APPKB		
		01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	unit	0	15	9.000.000	17	9.900.000	19	10.890.000	21	11.979.000	23	13.176.900	25	14.494.590	27	15.944.049	DINSOSP3APPKB		
		01.207.00	Pengadaan Mebel	tersedianya Mebeleur kantor	unit	0	15	9.000.000	17	9.900.000	19	10.890.000	21	11.979.000	23	13.176.900	25	14.494.590	27	15.944.049	DINSOSP3APPKB		
		01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	0	100	1.099.930.000	100	1.209.923.000	100	1.330.815.300	100	1.463.696.830	100	1.609.766.513	100	1.770.343.164	100	1.946.877.481	DINSOSP3APPKB		
		01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materai kantor	lembar	0	1000	10.000.000	1100	11.000.000	1200	12.000.000	1300	13.000.000	1400	14.000.000	1500	15.000.000	1600	16.000.000	DINSOSP3APPKB		
		01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya pembayaran rekening telpon, internet, listrik dinas, dan listrik puding KB	tahun	0	1	50.400.000	1	55.440.000	1	60.984.000	1	67.082.400	1	73.790.640	1	81.169.704	1	89.286.674	DINSOSP3APPKB		
		01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pengelola keuangan dinas dan gaji PTT, THL, Sopir	tahun	0	1	1.039.530.000	1	1.143.483.000	1	1.257.831.300	1	1.383.614.430	1	1.521.975.873	1	1.674.173.460	1	1.841.590.806	DINSOSP3APPKB		
		01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase bertingalnya sarana dan prasarana aparatur	persentase	0	100	198.070.000	100	202.247.000	100	206.841.700	100	211.895.870	100	217.455.457	100	223.571.003	100	230.298.103	DINSOSP3APPKB		
		01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan kendaraan jabatan dan pajak	unit	0	1	19.000.000	1	20.900.000	1	22.990.000	1	25.289.000	1	27.817.900	1	30.599.690	1	33.659.659	DINSOSP3APPKB		
		01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak dan service kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4	unit	0	9 unit, 32 unit	156.300.000		156.300.000	9 unit, 32 unit	156.300.000	9 unit, 32 unit	156.300.000	9 unit, 32 unit	156.300.000	9 unit, 32 unit	156.300.000	9 unit, 32 unit	156.300.000	DINSOSP3APPKB		
		01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan kerja yang layak pakai	unit	0	33	22.770.000	33	25.047.000	33	27.551.700	33	30.306.870	33	33.337.557	33	36.671.313	33	40.338.444	DINSOSP3APPKB		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																							
Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan anak dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	persentase	0	88,35	1.354.487.500	88,43	2.316.207.000	88,26	2.470.437.350	88,45	2.624.378.718	88,50	2.781.371.653	88,55	2.941.445.236	88,55	3.116.367.498	DINSOSP3APPKB		
				Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persentase	0	100	1.314.411.500	100	604.407.000	100	659.627.350	100	715.108.718	100	770.864.153	100	826.907.361	100	883.252.729	DINSOSP3APPKB		
				persentase Organisasi perempuan yang aktif	persentase	0	95,23	1.314.411.500	96	554.407.000	98	607.127.350	100	659.983.718	100	712.982.903	100	766.132.049	100	819.438.651	DINSOSP3APPKB		
				Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat /Nilai	0	-	1.314.411.500	Pratama	604.407.000	-	659.627.350	Pratama	715.108.718	-	770.864.153	Madya	826.907.361	Madya	883.252.729	DINSOSP3APPKB		
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persentase	0	100	1.314.411.500	100	554.407.000	100	607.127.350	100	659.983.718	100	712.982.903	100	766.132.049	100	819.438.651	DINSOSP3APPKB	
				Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	terlaksananya penguatan kelembagaan PUG	OPD	0	38	657.411.500	38	54.407.000	38	57.127.350	38	59.983.718	38	62.982.903	38	66.132.049	38	69.438.651	DINSOSP3APPKB	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelatihan PPRG	OPD	0	38	657.411.500	38	54.407.000	38	57.127.350	38	59.983.718	38	62.982.903	38	66.132.049	38	69.438.651	DINSOSP3APPKB	
				penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	organisasi	0	17	657.000.000	16	500.000.000	16	550.000.000	16	600.000.000	16	650.000.000	16	700.000.000	16	750.000.000	DINSOSP3APPKB	
				Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	organisasi	0	17	657.000.000	16	500.000.000	16	550.000.000	16	600.000.000	16	650.000.000	16	700.000.000	16	750.000.000	DINSOSP3APPKB	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	persentase	0	0	-	61	50.000.000	63	52.500.000	63	55.125.000	64	57.881.250	65	60.775.313	65	63.814.078	DINSOSP3APPKB	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Tersedianya data terpilah gender dan anak	buku	0	0	-	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078	DINSOSP3APPKB	
				Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data terpilah gender dan anak	buku	0	0	-	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.250	1	60.775.313	1	63.814.078	DINSOSP3APPKB	
				Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat /Nilai	0	Pratama	40.076.000	Pratama	250.000.000	Pratama	262.500.000	Madya	275.625.000	Madya	289.406.250	Madya	303.876.563	Madya	319.070.391	DINSOSP3APPKB	
					rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persentase	0	100	-	100	1.461.800.000	100	1.548.310.000	100	1.633.645.000	100	1.721.101.250	100	1.810.661.313	100	1.914.044.378	DINSOSP3APPKB	
					Rasio KDRT	persentase	0	0,002	-	0,002	1.461.800.000	0,001	1.548.310.000	0,001	1.633.645.000	0,001	1.721.101.250	0,001	1.810.661.313	0,001	1.914.044.378	DINSOSP3APPKB	
		01.208.02	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	persentase perlindungan perempuan	persentase	0	0	-	75	790.205.000	80	835.000.000	85	881.750.000	90	930.337.500	95	980.854.375	100	1.043.397.094	DINSOSP3APPKB		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	LOKASI			
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				akhir periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2 08 03 201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	persentase	0	0	-	80	500.000.000	80	525.000.000	80	551.250.000	80	578.812.500	80	607.753.125	80	638.140.781	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 201 02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan perlindungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada wanita rawan perlakuan kekerasan	kegiatan	0	0	-	4	500.000.000	6	525.000.000	10	551.250.000	11	578.812.500	11	607.753.125	11	638.140.781	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertentuknya UPTD PPA untuk Layanan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak	unit	0	0	-	1	120.205.000	1	131.500.000	1	143.075.000	1	154.728.750	1	166.465.188	1	188.288.447	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 202 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasikannya Hotline Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan KIE dan Pemangangan Balho	persentase	0	0	-	100	30.000.000	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.728.750	100	36.465.188	100	38.288.447	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 202 02	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan bagi Perempuan korban kekerasan	orang	0	0	-	10	90.205.000	12	100.000.000	14	110.000.000	16	120.000.000	18	130.000.000	20	150.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 203	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	persentase pelayanan perlindungan perempuan yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	persentase	0	0	-	100	170.000.000	100	178.500.000	100	187.425.000	100	196.796.250	100	206.636.063	100	216.967.866	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 203 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kasus Kekerasan bagi anggota Satgas PPA	persentase	0	0	-	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313	100	63.814.078	DINSOSP3APPKB		
		2 08 03 203 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan usaha bagi perempuan rawan ekonomi	persentase	0	0	-	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	145.860.750	100	153.153.788	DINSOSP3APPKB		
		2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	persentase pemenuhan hak anak	persentase	80	40.076.000	85	250.000.000	90	262.500.000	95	275.625.000	100	289.406.250	100	303.876.563	100	319.070.391	DINSOSP3APPKB			
		2 08 06 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Predikat /Nilai	Pratama	40.076.000	Pratama	250.000.000	Pratama	262.500.000	Pratama	275.625.000	madya	289.406.250	madya	303.876.563	madya	319.070.391	DINSOSP3APPKB			
		2 08 06 202 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan penguatan lembaga pemenuhan hak anak	persentase	80	40.076.000	80	250.000.000	85	262.500.000	85	275.625.000	90	289.406.250	90	303.876.563	95	319.070.391	DINSOSP3APPKB			
		2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase perlindungan Anak	persentase	0	0	-	75	671.595.000	80	713.310.000	85	751.895.000	90	790.763.750	95	829.806.938	100	870.647.284	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 201	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	persentase	0	0	-	80	172.950.000	85	193.000.000	85	206.150.000	90	219.457.500	90	232.930.375	95	246.576.894	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 201 01	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	persentase	0	0	-	80	60.000.000	85	63.000.000	85	66.150.000	90	69.457.500	90	72.930.375	95	76.576.894	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 201 02	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) kekerasan terhadap anak	persentase	0	0	-	70	112.950.000	70	130.000.000	75	140.000.000	80	150.000.000	85	160.000.000	90	170.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 202	penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar operasional prosedur (SOP)	persentase	0	0	-	100	421.839.000	100	442.500.000	100	465.625.000	100	489.406.250	100	513.876.563	100	539.070.391	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 202 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tertentuknya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh nagari	nagari	0	0	-	4	200.000.000	8	210.000.000	12	220.500.000	25	231.525.000	25	243.101.250	52	255.256.313	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 202 02	koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan	orang	0	0	-	17	171.839.000	20	180.000.000	22	190.000.000	24	200.000.000	26	210.000.000	28	220.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 202 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan KIE dan balho untuk edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di setiap sekolah	persentase	0	0	-	80	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313	100	63.814.078	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 203	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan khusus anak yang sesuai standar	persentase	0	0	-	70	76.806.000	75	77.810.000	75	80.120.000	80	81.900.000	85	83.000.000	85	85.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 08 07 203 02	koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak	persentase	0	0	-	70	76.806.000	75	77.810.000	75	80.120.000	80	81.900.000	85	83.000.000	85	85.000.000	DINSOSP3APPKB		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
Meningkatnya Pengendalian Penduduk melalui keluarga yang berkualitas				persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persentase	0	2,80	3.671.989.100	2,75	3.141.634.000	2,70	1.884.050.000	2,65	1.875.540.000	2,60	2.040.200.000	2,55	1.997.300.000	2,55	1.997.300.000	DINSOSP3APPKB		
				Mengendalikan angka kelahiran total (TFR)	persentase	0	2,69	-	2,66	700.000.000	2,64	753.200.000	2,62	792.000.000	2,59	792.600.000	2,56	723.000.000	2,56	723.000.000	DINSOSP3APPKB		
				Meningkatkan jangkauan layanan ber-KB bagi PUS yang tidak terpenuhi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	persentase	0	81,15	3.631.989.000	81,20	1.851.050.000	81,25	524.850.000	81,30	459.700.000	81,35	612.100.000	81,40	613.300.000	81,40	613.300.000	DINSOSP3APPKB	
					Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	persentase	0	10,27	3.631.989.000	10,25	1.851.050.000	10,23	524.850.000	10,21	459.700.000	10,18	612.100.000	10,16	613.300.000	10,16	613.300.000	DINSOSP3APPKB	
			2 14 02	PROGRAM PEMBINAAN BERENCANA (KB)	persentase peningkatan kesepertaan KB	persentase	0	70	3.631.989.000	80	1.851.050.000	85	524.850.000	90	459.700.000	95	612.100.000	100	613.300.000	0	613.300.000	DINSOSP3APPKB	

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026				akhir periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2 14 03 201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dari kegiatan edukasi tentang program Bangga Kencana	persentase		2.476.047.000	85	118.250.000	90	55.000.000	100	63.250.000	85	118.250.000	90	118.250.000	90	118.250.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 201 01	promosi & KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	persentase masyarakat yang paham dan mengerti tentang program Bangga Kencana	persentase	0	0	0	85	55.000.000	85	55.000.000	85	55.000.000	85	55.000.000	85	55.000.000	85	55.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 201 02	penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK	jenis Lembar Balik, Poster untuk pengetahuan Lini Lapangan	Jenis	0	0	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	3	55.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 201 03	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	persentase pemahaman Stakeholder terhadap program Bangga Kencana	persentase	0	0	2.476.047.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 202	pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	persentase kemampuan petugas penyuluh KB dalam menjalankan program Bangga Kencana	persentase	0	0	95	240.000.000	95	240.000.000	0	240.000.000	95	240.000.000	95	240.000.000	95	240.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 202 01	pembinaan IMP dan program KKBPK dilini lapangan oleh PKB/PLKB	persentase pemahaman kader IMP terhadap program KKBPK	persentase	0	0	85	63.250.000	85	63.250.000	85	63.250.000	85	63.250.000	85	63.250.000	85	63.250.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 202 02	penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	terpenuhinya sarana di balai KB	persentase	0	0	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 202 03	pengerakan kader Institusi masyarakat pedesaan	persentase kemampuan SDM dilapangan	persentase	0	0	53	11.750.000	53	11.750.000	53	11.750.000	53	11.750.000	53	11.750.000	53	11.750.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 204	pemberdayaan & peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan & pembinaan kesetaraan ber-KB	persentase pemahaman Organisasi kemasyarakatan terhadap Program Bangga Kencana	persentase	0	0	0	0	0	90	141.400.000	90	141.400.000	90	141.400.000	90	141.400.000	90	141.400.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 204 04	pembinaan terpadu Kampung KB	terselenggaranya kegiatan terpadu Lini Sek terhadap program KKBPK	kampung KB	0	0	0	0	0	28	141.400.000	28	141.400.000	28	141.400.000	28	141.400.000	28	141.400.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota	terpenuhi kebutuhan Alokon di semua Faskes	persentase	0	0	1.155.942.000	100	1.492.800.000	100	229.850.000	100	255.050.000	100	253.850.000	100	255.050.000	100	255.050.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203 05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	persentase	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203 01	pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang KB di berbagai Faskes	Faskes	0	0	21	6.300.000	21	7.500.000	21	7.500.000	21	6.300.000	21	7.500.000	21	7.500.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 203 03	peningkatan kesetaraan penguasaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	persentase operasional capaian kesetaraan KB MKJP	persentase	0	0	100	25.200.000	0	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	100	25.200.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203 02	peningkatan kompetensi pengelola & petugas logistik Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB	persentase kemampuan petugas pengelola Faskes	persentase	0	0	85	6.050.000	85	6.050.000	85	6.050.000	85	6.050.000	85	6.050.000	85	6.050.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 203 04	penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penguasaan MKJP	persentase komplikasi dan kegagalan Akseptor pelayanan KB di semua Faskes, Rehab Gudang KB dan Balai penyuluhan	persentase	0	0	90	22.000.000	90	22.000.000	90	22.000.000	90	22.000.000	90	22.000.000	90	22.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 03 203 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	persentase Akseptor yang mendapatkan pelayanan KB	persentase	0	0	1.145.942.000	95	1.370.000.000	95	70.000.000	95	70.000.000	95	70.000.000	95	70.000.000	95	70.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203 07	pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB	persentase Akseptor yang mendapatkan pelayanan KB	persentase	0	0	0	95	61.050.000	95	61.050.000	95	61.050.000	95	61.050.000	95	61.050.000	95	61.050.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 03 203 13	peningkatan kesetaraan KB Pria	terpenuhi capaian Akseptor KB MOP	persentase	0	0	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	90	63.250.000	DINSOSP3APPKB		
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga			persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	persentase	0	100	40.000.100	100	590.584.000	100	606.000.000	100	623.840.000	100	635.500.000	100	661.000.000	100	661.000.000	DINSOSP3APPKB	
				persentase kelompok tribina yang aktif	persentase	0	100	40.000.100	100	590.584.000	100	606.000.000	100	623.840.000	100	635.500.000	100	661.000.000	100	661.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase kelompok tribina yang aktif	persentase	0	100	40.000.100	100	590.584.000	100	606.000.000	100	623.840.000	100	635.500.000	100	661.000.000	100	661.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 04 201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatkan pengetahuan keluarga	persentase	0	70	40.000.100	75	468.584.000	80	479.000.000	85	493.340.000	90	499.300.000	95	513.000.000	100	513.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2 14 04 201 02	pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)	tersedianya sarana prasarana penunjang penyuluhan	persentase	0	0	80	146.686.000	85	152.000.000	90	164.000.000	95	164.000.000	100	167.000.000	100	167.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 04 201 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kelompok	0	40.000.100	21	134.598.000	21 & 55	139.000.000	21 & 55	141.340.000	21 & 55	145.300.000	21 & 55	156.000.000	21 & 55	156.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 04 201 08	promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga	jumlah kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PPKS, UPPKS)	orang	0	0	660	187.300.000	210	188.000.000	220	188.000.000	230	190.000.000	244	190.000.000	244	190.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 04 202	pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase	0	0	65	122.000.000	70	127.000.000	75	130.500.000	80	136.200.000	85	148.000.000	90	148.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 04 202 01	penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)	terbitnya SK mitra kerja dalam pembinaan	kelompok	0	0	6	54.000.000	6	56.000.000	6	58.000.000	6	62.000.000	6	72.000.000	6	72.000.000	DINSOSP3APPKB		
		2 14 04 202 04	promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	tersedianya informasi tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	kelompok	0	0	6	68.000.000	6	71.000.000	6	72.500.000	6	74.200.000	6	76.000.000	6	76.000.000	DINSOSP3APPKB		

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung jawab	LOKASI
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		akhir periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase data kependudukan	persentase	0	0	-	100	700.000.000	100	753.200.000	100	792.000.000	100	792.600.000	100	723.000.000	100	723.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbitnya Jukla/ Juknis kegiatan	persentase	0	0	-	100	700.000.000	100	753.200.000	100	792.000.000	100	792.600.000	100	723.000.000	100	723.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.01	Penyerasian kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Terbitnya Peraturan Daerah	persentase	0	0	-	1	50.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	94.000.000	100	94.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Pedoman RPJMD	persentase	0	0	-	100	100.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	138.600.000	100	140.000.000	100	140.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Wilayah Pendataan	persentase	0	0	-	80	150.000.000	80	155.000.000	85	160.000.000	90	165.000.000	95	170.000.000	95	170.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah penetapan profil kependudukan	persentase	0	0	-	80	150.000.000	80	155.000.000	85	165.000.000	90	170.000.000	95	175.000.000	95	175.000.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah teradvokasi	persentase	0	0	-	50	100.000.000	65	105.000.000	75	110.000.000	85	115.000.000	90	12.500.000	90	12.500.000	DINSOSP3APPKB	
		2.14.02.201.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat	orang	0	0	-	1760	150.000.000	1840	153.200.000	1980	157.000.000	2200	124.000.000	2250	131.500.000	2250	131.500.000	DINSOSP3APPKB	

Pulau Punjung,

2021

KEPALA DINSOSP3APPKB,

BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19820521 200012 1 002

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD DINSOSP3APPKB Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	SOSIAL								
	Persentase PPKS yang tertangani	%	75	78	80	82	85	88	90
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	100	100	100
	Nilai AKIP DINSOSP3APPKB	Nilai/Predikat	BB (75,8)	BB (76,39)	BB (77,312)	BB (78,234)	BB (79,156)	A (80,078)	A (81)
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DINSOSP3APPKB	Nilai	N/A	64,9	68,7	71,4	74,2	77,0	80,0
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	80	80,5	81	81,5	82	82,5
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	persentase Organisasi perempuan yang aktif	%	95,23	95,23	96	98	100	100	100
	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Predikat/Nilai	-	-	Pratama	-	Pratama	-	Madya
	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Predikat/Nilai	tidak ada penilaian	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya

